



Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Teluk Amurang

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Injilia Klarisa Kawet Universitas Negri Manado Injiliakawet@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Aksilas Dasfordate Universitas Negri Manado aksilasdastfordate@unima.ac.id	
Darmawan Edi Winoto Universitas Negri Manado darmawanediwino@unima.ac.id	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Kawet, I. K., Dasfordate, A., & Winoto, D. E. (2025). Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Teluk Amurang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5839-5847.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan sumber daya pesisir terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Teluk Amurang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika perekonomian masyarakat pesisir. Wilayah pesisir Teluk Amurang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan tangkap, budidaya laut, serta sumber daya non-hayati yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam dengan nelayan, pelaku usaha pengolahan hasil laut, dan tokoh masyarakat, serta observasi langsung di lapangan dan studi dokumentasi terhadap data instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir, khususnya melalui kegiatan perikanan tangkap, pengolahan hasil laut, dan perdagangan hasil perikanan, memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitar. Aktivitas tersebut menjadi sumber utama pendapatan dan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk pesisir. Namun demikian, keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan teknologi penangkapan dan pengolahan, akses yang minim terhadap modal usaha, kurangnya infrastruktur pendukung, serta menurunnya kualitas lingkungan akibat eksploitasi berlebihan dan pencemaran. Selain faktor-faktor ekonomi, aspek sosial dan budaya juga berpengaruh terhadap pola pemanfaatan sumber daya pesisir. Nilai-nilai tradisional, sistem gotong royong, serta pola kepemimpinan lokal memainkan peran penting dalam mengatur distribusi hasil dan menjaga keseimbangan sosial di masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Teluk Amurang memerlukan strategi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dukungan kebijakan pemerintah, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam mengoptimalkan potensi pesisir secara berkeadilan dan ramah lingkungan.

Kata Kunci: Sumber Daya Pesisir, Kehidupan Ekonomi, Masyarakat Pesisir, Teluk Amurang

Abstract

This study aims to analyze the utilization of coastal resources and their impact on the economic life of coastal communities in Amurang Bay, as well as to identify the factors influencing the economic dynamics of these communities. The coastal area of Amurang Bay possesses abundant natural resource potential, including capture fisheries, marine aquaculture, and non-living resources that have the capacity to enhance community welfare. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection methods consisting of in-depth interviews with fishermen, seafood processing business actors, and community leaders, as well as direct field observations and documentation studies of data obtained from relevant institutions. The results indicate that the utilization of coastal resources, particularly through capture fisheries, seafood processing, and fishery product trade, provides a significant economic contribution to the surrounding communities. These activities serve as the primary sources of income and employment for the majority of the coastal population. However, the economic sustainability of coastal communities continues to face various challenges, including limited fishing and processing technology, restricted access to business capital, inadequate supporting infrastructure, and declining environmental quality due to overexploitation and pollution. In addition to economic factors, social and cultural aspects also influence patterns of coastal resource utilization. Traditional values, mutual cooperation systems, and local leadership structures play an important role in regulating resource distribution and maintaining social balance within the community. Therefore, improving the welfare of coastal communities in Amurang Bay requires sustainable resource management strategies, strong government policy support, and capacity building to empower communities to optimize coastal potential in an equitable and environmentally friendly manner.

Key Words: Coastal Resources, Economic Life, Coastal Communities, Amurang Bay

A. Pendahuluan

Sumber daya alam wilayah pantai memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian masyarakat, terutama bagi komunitas nelayan. Namun, karakteristik sumber daya pesisir dan laut sebagai milik bersama yang dapat diakses oleh semua pihak telah menyebabkan peningkatan pemanfaatan sumber daya tersebut di hampir semua wilayah. Kondisi ini telah menyebabkan pemanfaatan sumber daya yang cenderung melenihi daya dukung lingkungan

Wilayah pesisir pada dasarnya berfungsi tidak hanya sebagai zona transisi antara ekosistem darat dan laut, tetapi juga sebagai titik pertemuan berbagai aktivitas ekonomi berbasis darat dan laut. Wilayah ini berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan dan rute distribusi sumber daya laut serta sumber daya lainnya ke kawasan darat. Sebaliknya, berbagai sumber daya juga mengalir dari darat ke laut dan udara melalui area pesisir. berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan peradaban manusia. Faktanya, daerah pesisir menjadi tempat tinggal bagi sekitar 60% dari total penduduk dunia. Sejak masa lampau, wilayah pesisir telah berperan sebagai tempat penting dalam perkembangan aktivitas manusia. Kawasan pesisir memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan. hal ini dikarenakan kawasan pesisir memiliki kekayaan sumber daya hayati yang sangat banyak. Akan tetapi kawasan pesisir tidak lepas dari permasalahannya. salah satunya adalah abrasi atau erosi pantai. Kawasan pesisir yang memerlukan penanganan bersifat segera, termasuk isu abrasi. Untuk mengatasi abrasi tersebut maka diperlukan suatu pendekatan pengelolaan yang berbasis masyarakat dan ekosistem, (deasilia indrasari hlmn 43).

Secara umum, di Indonesia, tentu saja masyarakat mengalami perubahan yang sangat signifikan. Situasi ini disebabkan oleh kemajuan zaman yang terus berlangsung, yang berakibat pada perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan mendorong timbulnya pandangan dan pemikiran mengenai kehidupan masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Di mana masyarakat kecil yang tinggal di pesisir memahami bahwa mereka menjalani kehidupan yang sederhana, khawatir akan potensi penurunan sumber daya laut yang berdampak pada mereka. Daerah Perlindungan Laut (DPL) merupakan kawasan laut yang dikelola dan dijaga secara bersama oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir seperti nelayan skala kecil. Pembentukan DPL bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan agar tidak mengalami penurunan

atau kepunahan. Dengan pengelolaan dan perlindungan yang baik, ketersediaan sumber daya perikanan dapat terus terjamin sehingga mendukung keberlangsungan mata pencaharian nelayan kecil. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam laut menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat pesisir.

Sebagaimana ditetapkan peraturan gubernur Sulawesi Utara nomor 11 tahun 2023 tentang rencana aksi pengelolaan perikanan berkelanjutan tahun 2023-2028. Wilayah pesisir memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun ke depan tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memanfaatkan potensi tersebut secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu agar berbagai kegiatan pemanfaatan dapat berjalan selaras, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah diharapkan dapat mengelola kawasan pesisir secara menyeluruh dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Di Teluk Amuang, pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian mereka.

Kehidupan masyarakat adalah keadaan nyata yang dapat diungkapkan melalui usaha mereka yang dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan, kondisi alam tidak menunjang, terbatasnya modal dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan keadaan sosial ekonomi lemah. Wilayah pesisir memiliki potensi yang besar untuk dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sumber daya alam laut yang tersedia dapat dioptimalkan guna memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Keberadaan fasilitas pendukung seperti tempat pelelangan ikan menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki potensi perikanan yang signifikan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, kawasan pesisir tersebut memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah serta peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya perikanan.

Namun, kondisi fasilitas yang dimiliki para nelayan, terutama tempat pelelangan ikan, tidak mendapatkan perhatian yang cukup, mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengunjung. Situasi tempat pengelolaan ikan atau rumah industri masih tergolong sederhana, sehingga pengelolaan hasil sumber daya alam belum optimal. Selain itu, alat tangkap yang digunakan oleh sebagian nelayan masih bersifat tradisional, padahal jika mereka beralih ke teknologi alat tangkap modern, hasil tangkapan mereka bisa lebih baik. Terakhir, kurangnya modal di kalangan nelayan juga menjadi penghambat bagi perkembangan usaha perikanan mereka. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Terhadap Kehidupan Ekonomi Di Teluk Amurang. Alasan mengambil topik ini karena ingin menganalisis potensi sumber daya pesisir.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-struktural yang merujuk pada pemikiran Marc Bloch dari mazhab Annales, yang memandang sejarah sebagai suatu proses sosial yang berlangsung secara berkelanjutan dan berlapis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pemanfaatan sumber daya pesisir terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Teluk Amurang tidak hanya sebagai fenomena kontemporer, tetapi sebagai bagian dari proses historis yang panjang dan dibentuk oleh struktur sosial masyarakat pesisir. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelusuri bagaimana pola-pola sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir terbentuk dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, serta bagaimana ingatan kolektif, pengalaman historis, dan nilai-nilai sosial komunitas nelayan memengaruhi cara pandang, perilaku ekonomi, dan pola pemanfaatan sumber daya pesisir hingga saat ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Teluk Amurang, Provinsi Sulawesi Utara, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan strategis yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan hasil laut yang signifikan bagi perekonomian lokal. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan masyarakat pesisir dan instansi terkait untuk memperoleh gambaran kualitatif secara mendalam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan publikasi resmi instansi seperti Badan Perencanaan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Tata Ruang, serta Badan Pusat Statistik Kota Amurang, serta sumber literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Keabsahan data dijaga dengan menerapkan kriteria kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Moleong, guna memastikan bahwa data dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

Aspek-Aspek yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pesisir Kecamatan Amurang Barat

1. Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan



Gambar 1. Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Amurang Bara
(Sumber Internet)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perikanan. Keberadaan TPI berkontribusi terhadap peningkatan usaha serta kesejahteraan nelayan, khususnya dalam proses pemasaran hasil tangkapan. Sejak awal, sistem pelelangan ikan dikembangkan sebagai upaya untuk melindungi nelayan dari praktik penentuan harga yang tidak menguntungkan oleh pihak perantara. Melalui mekanisme pelelangan, nelayan memiliki kesempatan untuk menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih wajar dan kompetitif. Di Kecamatan Amurang Barat, potensi sumber daya laut yang melimpah dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir melalui aktivitas jual beli hasil perikanan, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

2. Tempat Pengelolaan Ikan/Rumah Industri

Rumah industri merupakan bentuk usaha berskala kecil yang umumnya dikelola oleh keluarga dan dijalankan di lingkungan tempat tinggal. Usaha ini memanfaatkan hasil perikanan sebagai bahan baku utama untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Pemerintah Kota Amurang aktif mendorong pengembangan industri kecil yang fokus pada pengolahan hasil perikanan. Kecamatan Amurang Barat sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat setempat, khususnya kaum perempuan, dilibatkan dalam proses pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk, seperti ikan asin, terasi, abon ikan, serta produk olahan lainnya. Keberadaan rumah industri ini berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat pesisir.



Gambar 2. Pengelolaan Ikan Asin
(Sumber Internet)



Gambar 3. Pengelolaan Abon
(Sumber Internet)

Produk olahan hasil perikanan mencakup ikan asin, terasi, abon ikan, serta berbagai jenis produk olahan lainnya.

3. Alat Tangkap

Alat tangkap adalah peralatan utama yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk memperoleh ikan dan sumber daya laut lainnya. Macam-macam alat tangkap yang dipakai oleh nelayan di Kecamatan Amurang Barat cukup beragam, namun informasi mengenai jenis, ukuran, dan spesifikasi alat tangkap tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, dilakukan identifikasi

terhadap alat tangkap yang digunakan, meliputi ukuran, bahan, serta bagian-bagian penyusunnya.



Gambar 4. Alat Tangkap Pukat
(Sumber Internet)



Gambar 5. Alat Tangkap Jaring
(Sumber Internet)

4. Dukungan modal

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha. Modal digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional, seperti pembelian bahan baku, perawatan peralatan, serta pembayaran tenaga kerja. Modal yang dikeluarkan diharapkan dapat kembali melalui hasil penjualan produk dan selanjutnya digunakan kembali untuk mendukung keberlangsungan usaha. Modal kerja mencakup berbagai komponen biaya operasional aset jangka pendek mencakup kas, persediaan, piutang, serta alokasi penyusutan untuk bangunan dan peralatan. Ketersediaan dukungan modal yang memadai akan membantu kelancaran kegiatan usaha masyarakat pesisir dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Kecamatan Amurang Barat.

Analisis fisik wilayah pesisir

1. Pasang Surut

Berdasarkan hasil kajian hidro-oceanografi pada wilayah perairan. Kota Amurang, kondisi pasang surut di Teluk Amurang menunjukkan variasi yang cukup dinamis. Pada saat air laut berada pada titik surut terendah, ketinggian muka air laut tercatat berada pada kisaran 0,25 hingga 1,5 meter. Sebaliknya, pada kondisi pasang maksimum, ketinggian air laut dapat mencapai antara 1,5 hingga 3 meter. Informasi hidro-oceanografi tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis karakteristik pasang surut di wilayah pesisir Kecamatan Amurang Barat.

2. Kedalaman

Karakteristik kedalaman perairan di Teluk Amurang memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok antara kawasan bagian dalam teluk dan bagian luar teluk. Pada wilayah bagian dalam teluk, kedalaman perairan berada pada rentang 1 hingga 700 meter dengan kondisi arus yang relatif lemah. Sementara itu, di bagian luar teluk, kedalaman perairan mencapai sekitar 800 hingga 1.300 meter dan ditandai dengan kekuatan arus yang lebih besar. Data hidro-oceanografi perairan Kota Amurang dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk menggambarkan kondisi kedalaman perairan di kawasan pesisir Kecamatan Amurang Barat.

3. Pola Arus Musiman

a. Musim Barat (Desember-Februari 2024)

Data parameter oseanografi diperoleh dari hasil pengamatan di perairan Teluk Amurang selama tahun 2023. Hasil pengamatan selama satu tahun menunjukkan bahwa suhu rata-rata perairan laut lebih dominan terjadi pada musim Barat. Selain itu, nilai salinitas air laut memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan antara musim Barat dan musim Timur. Pada musim Barat, tingkat salinitas berada pada kisaran 25,0 hingga 32,0‰ dengan nilai rata-rata sebesar 29,5‰. Adapun pada musim Timur, salinitas air laut berada pada rentang 30,5 hingga 34,0‰ dengan nilai rata-rata mencapai 32,5‰. Selisih rata-rata salinitas antara kedua musim tersebut tergolong cukup besar, yakni sekitar 3,0‰.

b. Musim Peralihan I (Maret-Mei 2024)

Arus pada musim peralihan I pada kondisi surut. Arus dari barat berbelok ke utara dengan kecepatan berkisar 0,22-1,37 m/s. Arus di lokasi tergolong tinggi, hal ini dikarenakan lokasinya dekat dengan perairan terbuka. Kemudian arus bergerak ke arah utara melewati berbelok ke arah barat laut dengan kecepatan arus berkisar 0,2-1,2 m/s. Arus tergolong tinggi, dikarenakan dekat dengan perairan terbuka. Sebagian arus dengan kecepatan arus

berkisar 0,0029-0,017 m/s cenderung ke arah selatan. Arus tergolong rendah, hal ini dikarenakan berada di dalam teluk.

Analisis Sosial Budaya Masyarakat

1. Strata Sosial

Struktur stratifikasi sosial masyarakat nelayan di Kecamatan Amurang Barat pada umumnya terbagi ke dalam dua lapisan utama. Lapisan pertama ditempati oleh kelompok pemilik usaha perikanan atau juragan. Kelompok ini mencakup beberapa kategori, antara lain juragan yang berperan sebagai pengusaha, juragan yang menjadikan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan utama, serta juragan yang dalam praktiknya juga terlibat langsung sebagai tenaga kerja. Lapisan berikutnya adalah kelompok buruh nelayan yang terdiri atas nahkoda, teknisi kapal, dan anak buah kapal (ABK) merupakan bagian dari struktur sosial yang saling bergantung, membentuk pola interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan di Kecamatan Amurang Barat.

Pembagian lapisan sosial tersebut terutama dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan ekonomi, di mana kelompok juragan menempati posisi sosial dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibandingkan buruh nelayan. Namun demikian, posisi sosial dalam masyarakat nelayan tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang pendidikan formal, melainkan juga oleh tingkat pengetahuan praktis dan keterampilan yang dimiliki, seperti kemampuan memperbaiki kapal, mengoperasikan alat tangkap secara efektif, serta menentukan lokasi penangkapan ikan. Hubungan sosial antar nelayan terbangun melalui pola kerja sama dalam aktivitas perikanan, termasuk pembentukan koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk mendukung kegiatan usaha juragan sekaligus memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar anggota masyarakat nelayan.

2. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Amurang Barat umumnya masih berada pada tingkat yang relatif sederhana. Sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu berukuran kecil dan memanfaatkan alat tangkap tradisional dalam aktivitas penangkapan ikan. Meskipun beberapa nelayan telah mengoperasikan perahu bermesin, jenis alat tangkap yang dipakai tetap tergolong sederhana, antara lain pancing, jaring, jala, dan pukat. Keterbatasan sarana penangkapan ini berimplikasi pada rendahnya kuantitas hasil tangkapan yang diperoleh, sehingga menyulitkan nelayan untuk bersaing dengan mereka yang menggunakan kapal berukuran besar dan teknologi penangkapan yang lebih modern. Aktivitas penangkapan ikan sangat bergantung pada faktor musim dan cuaca, sehingga hasil tangkapan yang diperoleh tidak bersifat tetap. Ketidakpastian pendapatan tersebut menyebabkan kondisi ekonomi nelayan, khususnya buruh nelayan, masih berada pada tingkat kesejahteraan yang relatif rendah.

Dalam kondisi hasil tangkapan yang meningkat, sebagian nelayan cenderung memanfaatkan pendapatan untuk membeli barang-barang konsumtif, seperti perhiasan dan perlengkapan rumah tangga. Namun, ketika memasuki musim paceklik atau terjadi cuaca buruk yang menghambat aktivitas melaut, barang-barang tersebut sering kali dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Terbatasnya Mata Pencarian

Mata pencaharian masyarakat pesisir di Kecamatan Amurang Barat dapat diklasifikasikan ke dalam mata pencaharian utama dan mata pencaharian tambahan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan penghidupannya pada sektor perikanan sebagai nelayan. Namun demikian, hasil tangkapan yang diperoleh masih relatif terbatas akibat rendahnya penggunaan teknologi modern dan alat tangkap yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pendapatan nelayan cenderung stagnan dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu.

Dalam kegiatan penangkapan ikan, nelayan sangat bergantung pada dukungan teknologi, mengingat sumber daya ikan bersifat dinamis dan memerlukan peralatan khusus untuk memungkinkan nelayan bertahan lebih lama di laut. Akan tetapi, pada praktiknya sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap sederhana, sehingga jangkauan wilayah penangkapan hanya terbatas di sekitar perairan pantai. Selain itu, aktivitas nelayan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi musim. Pada saat terjadi gelombang tinggi, nelayan tidak dapat melaut dalam jangka waktu tertentu. Situasi tersebut berdampak pada penurunan pendapatan, sehingga hasil yang diperoleh pada musim ikan harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama periode nelayan tidak dapat melaut.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Masyarakat Wilayah Pesisir Kecamatan Amurang Barat

Ketersediaan sarana dan prasarana bagi nelayan menjadi salah satu faktor krusial dalam mendukung kegiatan perikanan. Keberadaan fasilitas tersebut berperan dalam mendukung kelancaran usaha nelayan serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aktivitas perikanan akan mengalami kendala sehingga sulit berkembang secara optimal. Sarana dan prasarana di wilayah pesisir berfungsi sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan berbagai aktivitas pelayanan dan kegiatan masyarakat. Ketidakterpenuhan sarana dan prasarana dapat menghambat pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan yang telah direncanakan tidak dapat tercapai secara maksimal. Sarana dapat dipahami sebagai alat atau perlengkapan yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan, baik sebagai peralatan utama maupun sebagai pendukung. Sementara itu, prasarana berperan sebagai fasilitas penunjang yang memungkinkan suatu kegiatan berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Wilayah pesisir Kecamatan Amurang Barat memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar. Potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir melalui aktivitas pemasaran hasil tangkapan laut. Keberadaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi sarana penting dalam membantu nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka. Dengan adanya TPI, proses jual beli hasil perikanan dapat berjalan lebih teratur, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Amurang Barat.

1. Ketersediaan Pengelolaan Ikan (Rumah Industri)

Industri rumahan atau home industry merupakan bentuk usaha berskala kecil yang umumnya dijalankan di lingkungan rumah tangga. Kegiatan usaha ini berfokus pada pengolahan bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Industri rumahan dikategorikan sebagai usaha kecil karena dikelola oleh anggota keluarga, bersifat mandiri, serta tidak bergantung pada kegiatan usaha berskala besar.

Pemerintah Kota Amurang mendorong pengembangan industri rumahan yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Hasil laut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diolah menjadi berbagai produk, seperti ikan asin, terasi, abon ikan, serta produk olahan perikanan lainnya. Keberadaan industri rumahan tersebut memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus membuka peluang kerja, khususnya bagi keluarga nelayan.

2. Dukungan Modal

Permodalan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan dalam mengembangkan usaha perikanan. Akses terhadap sumber pembiayaan formal masih tergolong terbatas, baik karena persyaratan yang relatif rumit maupun kurangnya informasi mengenai lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan. Kondisi tersebut mendorong sebagian nelayan untuk mengandalkan modal pribadi, menyisihkan sebagian hasil usaha, atau meminjam dana dari keluarga serta sumber pembiayaan informal lainnya. Di Kota Amurang, keterbatasan modal yang dialami oleh nelayan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan usaha perikanan tangkap yang mereka jalankan.

3. Kendala kendala

Pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Amurang dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Dari sisi lingkungan, kerusakan ekosistem pesisir akibat abrasi, sedimentasi, dan pencemaran limbah rumah tangga maupun industri menurunkan produktivitas laut sehingga hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya menurun. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem, seperti gelombang tinggi dan badai, juga mengganggu aktivitas melaut nelayan dan mempercepat kerusakan pantai. Dari sisi sosial, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan membuat pengelolaan sumber daya laut belum optimal.

Kendala ekonomi juga signifikan, karena akses permodalan terbatas, harga hasil tangkapan sering tidak stabil, dan infrastruktur pendukung seperti dermaga, pasar ikan, dan fasilitas pengolahan hasil laut masih minim, sehingga potensi ekonomi dari perikanan dan perdagangan laut belum maksimal. Selain itu, kendala kebijakan dan tata kelola turut memengaruhi, antara lain program pemerintah daerah yang kurang optimal, zonasi pesisir yang belum jelas, dan koordinasi antarsektor yang lemah, sehingga pengelolaan sumber daya pesisir tidak berjalan efektif. Semua kendala ini secara keseluruhan menghambat masyarakat pesisir Teluk Amurang dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan potensi laut dan pesisir yang sebenarnya cukup besar, baik dari sektor perikanan, pariwisata bahari, maupun kegiatan ekonomi terkait lainnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan sumber daya pesisir terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Teluk Amurang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Sumber Daya Pesisir. Pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Amurang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui sektor perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan terlibat dalam industri rumahan pengolahan ikan.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian: Perekonomian masyarakat pesisir dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:
 - Ketersediaan Fasilitas: Fasilitas seperti TPI dan rumah industri pengolahan ikan berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
 - Teknologi: Keterbatasan teknologi penangkapan ikan menjadi kendala bagi peningkatan produktivitas nelayan.
 - Modal: Akses terhadap modal usaha masih menjadi masalah bagi sebagian besar nelayan.
 - Kondisi Lingkungan: Kerusakan lingkungan pesisir, seperti kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang, dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.
 - Aspek Sosial Budaya: Stratifikasi sosial dan keterbatasan keterampilan juga memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Potensi dan Tantangan: Teluk Amurang memiliki potensi sumber daya pesisir yang besar, namun pemanfaatannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya.
4. Tingkat Kesejahteraan: Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Teluk Amurang masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar nelayan memiliki pendapatan yang terbatas dan rentan terhadap fluktuasi musim dan cuaca.

E. Referensi

- Adrianto, L. (2004). *Ekonomi dalam pengelolaan mangrove dan terumbu karang*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Adrianto, L. (2006). *Pengenalan konsep dan metodologi valuasi ekonomi sumberdaya pesisir dan laut*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Anonim. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Badan Pusat Statistik Kota Kendari. (2016). Kota Kendari dalam angka. Kendari: BPS Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (1996). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dasfordate, A., & Burdam, Y. (2020). *Utilization of marine fisheries resources to meet the economic needs of the community in Latdalam Village, South Tanimbar District. Dalam Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Makassar, Indonesia.
- Ghofar. (2004). Peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hayati kawasan pesisir dan laut. *Jurnal Institut Pertanian Bogor*.
- Indrasari, D. (2020). Identifikasi masalah dan model pengelolaan wilayah pesisir: Studi kasus Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 5(1), 43–56.
- Kesek, V. P., Talumingan, C., & Pakasi, C. B. D. (2017). Identifikasi aktivitas perekonomian masyarakat sekitar Pelabuhan Amurang. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, 13(1), 1–10.
- Kusnadi. (2003). *Akar kemiskinan nelayan*. Jakarta: LKIS.
- Mailakay, F. M., Patty, W., Kaparang, F. E., Masengi, K. W., Pamikiran, R. D., & Luasunaung, A. (2024). Studi pemanfaatan fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 9(1), 9–14.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Tahun 2023–2028.
- Raharjo Adisasmita. (2014). *Ekonomi tata ruang wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rustiadi, E. (2010). *Pengembangan wilayah pesisir sebagai kawasan strategis pembangunan daerah*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Safira, E. (2020). Pengembangan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan di Ulele Kota Madya Banda Aceh. *Serambi Konstruktivis*, 2(2).
- Shiddiq, N., Nawawi, & Rafasya. (2012). *Pemanfaatan wilayah pesisir*. Makalah. Universitas Darussalam.
- Sutrisno, E. (2014). Implementasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan (Studi di perdesaan nelayan Cangkol, Kelurahan Lemahwungkuk, Kota Cirebon). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wahyono, A., Sudiyono, & Thufail, F. I. (1993). *Aspek-aspek sosial budaya masyarakat maritim Indonesia bagian timur: Hak ulayat laut Desa Para, Kecamatan Manganitu, Sangihe Talaud*. Seri Penelitian PMB LIPI No. 4.
- Watung, N., Dien, C. R., & Kotambunan, O. V. (2013). Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Propinsi Sulawesi Utara. *Akulturas*, 1(2).